

PENERAPAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) DI SMP NEGERI 1 BANJARANGKAN

I NENGAH SURADNYA

SMP Negeri 1 Banjarangkan

Email : suradnyainengah5@gmail.com

ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang disempurnakan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) dimana setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Permasalahan yang terjadi di SMP Negeri 1 Banjarangkan adalah belum tercipta budaya mutu pada warga sekolah hal ini dibuktikan dengan masih rendahnya standar mutu pada 8 (delapan) standar nasional Pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem penjaminan mutu internal di SMP Negeri 1 Banjarangkan. Penelitian dilaksanakan di SMPN 1 Banjarangkan, yang merupakan penelitian studi kasus. Dalam pengumpulan data yang diperoleh pada penelitian ini menggunakan teknik observasi atau pengamatan dan kuisisioner. Pengumpulan data dengan menggunakan lembar observasi dan lembar kuisisioner dan data dianalisis dengan statistik sederhana dengan membandingkan dan menginterpretasikan data yang diperoleh. Dari hasil penelitian diperoleh hasil positif penerapan SPMI di SMPN 1 Banjarangkan pada bidang organisasi, kebijakan dan proses, rapor mutu sekolah, hasil penilaian kinerja sekolah (PKS), prestasi akademik dan non akademik dan evaluasi dari LPMP Bali tentang efektivitas program SPMI di Provinsi Bali.

Kata kunci : *Penerapan, Sistem Penjaminan Mutu Internal*

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu untuk menyumbangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia, hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 yang disempurnakan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan dimana setiap satuan pendidikan pada jalur formal, informal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Dan pentingnya meningkatkan kompetensi peserta didik, kualitas pembelajaran, kualitas pengelolaan satuan Pendidikan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran dan kualitas pengelolaan satuan Pendidikan. Permasalahan yang terjadi di SMP Negeri 1 Banjarangkan belum tercipta budaya mutu pada warga sekolah hal ini dibuktikan dengan masih rendahnya standar mutu pada 8 (delapan) standar pendidikan. Pasal 1 ayat 4 Permendikbud Nomor 28 tahun 2016 menyatakan bahwa SPMI Dikdasmen adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas kebijakan dan proses yang terkait untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah untuk menjamin terwujudnya pendidikan bermutu yang memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan. Pada standar SKL dapat dilihat dari lulusan kurang memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan faktual, prosedural, konseptual dan metakognitif, kurang memiliki keretampilan berpikir dan bertindak kolaboratif. Pada standar isi sekolah belum melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan, kurang menyediakan alokasi waktu pembelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku. Kurangnya aspek kurikulum pada muatan lokal. Pada standar proses jumlah siswa pada rombongan belajar belum semuanya sesuai dengan ketentuan. Pada standar pendidik dan tenaga kependidikan belum berkompentensi secara profesional dan kurangnya tenaga pelaksana urusan administrasi berpendidikan sesuai dengan ketentuan, kurangnya tenaga laboran, tenaga pelaksanaan urusan administrasi, dan

tenaga teknis laboran. Standar sarana dan prasarana, rasio luas lahan belum sesuai dengan jumlah siswa, sekolah belum memiliki sarana dan prasarana yang lengkap, kondisi ruang kelas belum sesuai dengan standar, ruang perpustakaan belum layak, belum memiliki sapras pendukung yang lengkap, ketersediaan jamban belum sesuai standar. Pada standar pengelolaan belum memiliki pedoman pengelolaan secara lengkap dan pada standar pembiayaan, sekolah hanya mengandalkan sumber dana dari BOS sehingga ada kegiatan yang harus dicarikan pembiayaan dari sumber lainnya karena tidak semua kegiatan dapat dibiayai dari dana BOS. Kesemua hal di atas terungkap dalam rapor mutu pada PMP. Rendahnya mutu terjadi juga pada rata-rata hasil nilai UN dari tahun pelajaran 2015/2016 sampai dengan tahun pelajaran 2017/2018 yang terus mengalami penurunan seperti yang tertuang dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1. : Rata-rata Nilai UN dari Tahun Pelajaran 2015/2016-2017/2018

Mapel	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018
BI	66,03	64,57	61,92
B.Inggris	49,98	45,12	45,59
Mat	35,20	36,52	36,03
IPA	52,38	44,94	42,63
Rata-rata	50,90	47,79	46,54

Hal yang mendasar terjadi pada 3 (tiga) bidang yaitu organisasi, kebijakan, dan proses. Bidang sasaran organisasi, kebijakan dan proses sejalan dengan tugas kepala sekolah yang tertuang pada pasal 15 Permendikbud Nomor 6 tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah dimana pasal tersebut mengamanatkan beban kerja kepala sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Pada bidang organisasi sekolah belum memiliki tim penjamin mutu pendidikan sekolah (TPMPS), pada bidang kebijakan awalnya kebijakan pusat belum optimal ditindak lanjuti dalam bentuk kebijakan satuan pendidikan secara tertulis. Pada bidang proses terlihat masih rendahnya kemajuan guru dalam merencanakan pembelajaran yang mengakibatkan pada rendahnya mutu pembelajaran yang berpengaruh pada hasil pembelajaran. Masih minimnya inovasi pada satuan pendidikan. Dari catatan hasil supervisi yang pernah dilakukan kelemahan pada guru terletak pada desain pembelajarannya. Dimana guru lebih banyak mengambil peran bukan lagi sebagai agen pembelajaran namun pembelajaran berpusat pada guru (*teacher center*). Banyak guru yang belum mempunyai metode pembelajaran yang efektif sehingga pembelajaran kurang menyenangkan, pembelajaran menjadi pasif dan siswa kurang terlibat dalam PBM. Perencanaan pembelajaran yang telah dibuat oleh guru kurang dipelajari dan dipahami secara mendalam antara perencanaan dengan proses pelaksanaan pembelajaran tidak sesuai. Hal ini terlihat dari banyaknya guru yang menghabiskan waktu PBM sehingga waktu tidak sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan. Penilaian yang telah direncanakan tidak dapat dijalankan dalam PBM, sehingga guru tidak melakukan penilaian sesuai yang direncanakan sehingga daya capai indikator yang ditetapkan tidak dapat diukur. Disamping kelemahan diatas *mindset* atau pola pikir warga sekolah untuk memajukan sekolah rendah hal ini dapat dilihat dengan prestasi sekolah yang rendah dan inovasi-inovasi sekolah yang masih kurang. Untuk mengatasi permasalahan di atas maka perlu diterapkan sebuah sistem yang menjadikan mutu sekolah semakin baik yang disebut dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Hal sesuai dengan amanat Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 yaitu tentang Sistem Penjaminan Mutu pada Satuan Pendidikan. Dari uraian di atas dapat disusun rumusan masalah bagaimana Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di SMP Negeri 1 Banjarangkan? Penelitian bertujuan untuk mengetahui

penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di SMP Negeri 1 Banjarangkan. Manfaat secara teoritis peneliti memiliki pengetahuan atau wawasan tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), manfaat praktis tercipta budaya mutu terhadap semua warga sekolah.

METODE PENELITIAN

Penelitian studi kasus dilakukan di SMPN 1 Banjarangkan yang beralamat di Jalan Lettu Ida Bagus Puja Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung Provinsi Bali. Metoda yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan metoda observasi atau pengamatan dan kuisisioner. Pengumpulan data dengan melalui lembar pengamatan dan lembar kuisisioner dan sumber data merupakan data primer dan data skunder dari tahun 2016 s.d. tahun 2018 mulai awal ditetapkan SMPN 1 Banjarangkan sebagai sekolah model berdasarkan SK. LPMP Bali No. 368/D7.16/KP/2017 tertanggal 8 Mei 2017, SK. Kadisdik Kabupaten Klungkung No. 72.1 Tahun 2018 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah No. 871/644/SMP.1Bra/Dikpora/2016 tentang Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penerapan sistem penjamin mutu internal (SPMI) di SMP N 1 Banjarangkan yang telah berjalan selama 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2016-2018 terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan tahap monitoring evaluasi. Pada tahap perencanaan Kepala Sekolah diberikan Bimtek oleh LPMP Bali oleh para widyaiswara yang berkompenten di bidangnya dan para pengawas sekolah di tiap-tiap Kabupaten/Kota termasuk pengawas pembina. Hal ini sejalan dengan tugas kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola satuan Pendidikan (Kemendikbud, 2018). Adapun materi yang diperoleh pada tahap awal ditetapkan sebagai sekolah model yaitu penjaminan mutu Pendidikan yang didalamnya memuat acuan mutu pendidikan, sistem penjamin mutu oleh satuan pendidikan, tim penjamin mutu pada satuan pendidik dan ukuran keberhasilan penjaminan mutu pada satuan pendidikan. Disamping itu juga diberikan materi tentang standar mutu, pemetaan mutu, penyusunan rencana pemenuhan mutu, implementasi pemenuhan mutu dan evaluasi pelaksanaan pemenuhan mutu.

Pada tahap awal pelaksanaan penjaminan mutu pada sekolah model yang sekarang disebut dengan sekolah yang difasilitasi dalam pengembangan SPMI belum bisa berjalan efektif karena satuan pendidikan baru tahap awal mengenal penjamin mutu pendidikan pada satuan pendidikan dan evaluasi serta monitoring dari instansi terkait juga belum optimal. Yang hadir pada kegiatan tersebut sebagai peserta adalah pengawas pembina, kepala sekolah, unsur komite, unsur guru dan unsur staf TU. Langkah-langkah pelaksanaan yang dilakukan oleh lembaga yaitu dari segi organisasi membentuk Tim Penjamin Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) dari segi kebijakan melakukan sosialisasi kepada warga sekolah dan kepada sekolah imbas yaitu sebanyak 5 (lima) sekolah imbas yaitu SMPN 2 Banjarangkan, SMPN 3 Banjarangkan, SMPN 4 Banjarangkan, SMP Satap Takmung dan SMP PGRI Klungkung.

Dari segi proses sekolah melaksanakan pengembangan perangkat pembelajaran untuk memperkuat pemahaman Kurikulum 13 (K-13) dan beberapa inovasi. Pada tahap monitoring evaluasi dilaksanakan pengisian instrumen monev dari LPMP dan dari monev internal sekolah. Sekolah telah membentuk Tim Penjamin Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah No. 871/644/SMP.1Bra/Dikpora/2016. Adapun tugas dari Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab program adalah menyusun regulasi seperti membuat komitmen mutu, membuat SK.TPMPS, membuat program pengembangan SPMI, dan melaksanakan monev. Ketua memiliki tugas, menyusun perencanaan program, mengkoordinir dalam pelaksanaan kegiatan dan melanjutkan hasil kegiatan. Sekretaris bertugas dibidang administrasi penjaminan mutu, bendahara mengurus tentang keuangan sedangkan Tim Pengembang Standar tim pengendali dokumen dan Tim Audit mutu bertugas menyusun program, melaksanakan kegiatan di bidangnya masing-masing serta memberikan rekomendasi

dan menyusun rencana tindak lanjut. Dimana pembentukan TPMPS dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 2016 dan pembentukan komitmen mutu dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2016. Pada tahap II perjalanan SPMI yaitu pada Tahun 2017 dilaksanakan Bimtek di SD Kamasan Klungkung yang diikuti oleh Kepala Sekolah dan Perwakilan Guru yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan sekolah model, menguatkan pengembangan sekolah model, dan mengevaluasi kendala-kendala dan capaian yang telah diprogramkan. Dalam tahap pelaksanaan menggunakan in-1,on-1, on-2 dan in-2. Pelaksanaan pendampingan SPMI diawali dengan sosialisasi kepada warga sekolah. Pada tahap in-1 dengan mengundang sekolah imbas, Widyaiswara LPMP Bali, Pihak Dinas Pendidikan, Pengawas Sekolah, Sekolah model sebagai penyelenggara dan melaksanakan sosialisasi pada tanggal 9 Nopember 2017.

Pada pelaksanaan on-1 Kepala Sekolah dan Fasilitator Daerah (Fasda) melaksanakan pendampingan pada sekolah imbas pada tanggal 4 Desember 2017 dengan materi pendampingan meliputi komitmen mutu, pembentukan TPMPS, Struktur Organisasi pemetaan mutu dan profil sekolah imbas. Pada pelaksanaan on-2 di sekolah imbas yang dilaksanakan oleh Fasda dan kepada sekolah model Melaksanakan pendampingan ke-2 dengan materi pendampingan berupa review pemetaan mutu, RKJM, RKT dan RKAS. Pada pelaksanaan In-2 kembali para peserta sekolah imbas dan perwakilan TPMPS hadir kembali di Sekolah Model dengan materi kegiatan presentasi profil sekolah imbas, pembentukan dan penyampaian analisis mutu, rencana pemenuhan mutu, pelaksanaan pemenuhan mutu dan evaluasi dari pelaksanaan pemenuhan mutu yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2017. Bimtek SPMI yang dilaksanakan oleh LPMP Bali Tahun 2017 yang ditindaklanjuti dengan bimtek bantuan Pemerintah Tahun 2017 melalui metode in-1,on-1,on-2 dan in-2. Dimana SMP Negeri 1 Banjarangkan sebagai sekolah model ditetapkan melalui SK LPMP Bali No. 368/D7.16/KP/2017 tertanggal 8 Mei 2017.

Adapun dampak positif dari segi organisasi telah memiliki Tim Penjamin Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) dengan tufoksi masing-masing yang ditindaklanjuti dengan Tim Penguatan Pendidikan Karakter (TPPK), Tim Gerakan Literasi Sekolah (GLS). Dari segi kebijakan SMPN 1 Banjarangkan telah memiliki komitmen mutu warga sekolah, SK TPMPS, SK TPPK, SK GLS, dan Regulasi Pemerintah Pusat dan Daerah di tindaklanjuti dengan regulasi sekolah seperti SK Tugas, SK PPDB, SK UAS, UKK dan SK USBN UNBK. Bidang proses sekolah melaksanakan pemetaan mutu melalui analisis mutu yang terdiri-dari standar, indikator mutu, kondisi saat ini, nilai capai mutu, analisis lingkungan (kekuatan dan kelemahan) masalah dan akar masalah. Rencana pemenuhan mutu terdiri dari standar, permasalahan program, kegiatan, volume kegiatan, kebutuhan biaya dan sumber dana. Sedangkan rencana pemenuhan mutu terdiri dari standar, program kegiatan, kegiatan, penganggung jawab, waktu pelaksanaan dan pemangku kepentingan yang dilibatkan dan evaluasi implementasi mutu terdiri dari standar program, kegiatan, indikator keberhasilan dan kesimpulan pelaksanaan program penyelesaian. Disamping memiliki dokumen pemetaan mutu sekolah menindaklanjuti dan melaksanakan workshop dengan agenda penyusunan perangkat pembelajaran dan pengembangan K.13 yang bertujuan untuk meningkat kompetensi dan tugas utama guru sesuai amanat PP No. 19 Tahun 2017 tentang Guru. Kegiatan dihadiri oleh Bapak Kadisdik Kab. Klungkung sekaligus membuka kegiatan workshop yang dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 17 Juli 2017. Tahun 2018 LPMP Bali berdasarkan hasil monev pendampingan SPMI pada Tahun 2017 melakukan beberapa perubahan terutama pada teknis pendampingan. Kegiatan pada Tahun 2018 diawali dengan Bimtek Bantah (Bantuan Pemerintah) berdasarkan surat keputusan Kepala LPMP Bali No. 081/D7.16-PPK/KP/2018 tentang penerima dana bantuan pemerintah sekolah model dimana bantuan lebih menekankan pada pengembangan sekolah model sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Bapem tersebut.

Kegiatan diawali dengan workshop SPMI yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2018 bertempat di SMPN 1 Banjarangkan yang dihadiri oleh sekolah imbas, Widyaiswara LPMP Bali, Dinas Pendidikan dan pengawas sekolah dengan jumlah peserta 30 orang. Dengan struktur materi Kebijakan SPMI oleh Kadisdik Kabupaten Klungkung, Kebijakan Sekolah Model,

Pemetaan dan Rapor Mutu Sekolah Model Tahun 2017, Implementasi pemenuhan mutu (perencanaan, pelaksanaan, penilaian pembelajaran dan pelaporan hasil belajar serta penyusunan RTL. Pada kegiatan tersebut ditekankan bahwa sekolah model dilaksanakan dengan inspiratif melalui kegiatan yang menarik, disiplin dan tanggungjawab, saling menjalin kerjasama dan komunikasi Pendampingan dari LPMP Bali melalui Widyaiswara melaksanakan pendampingan secara terjadwal bersama 1(satu) orang staf administrasi keuangan. Karena hasil dari kegiatan pendampingan diwajibkan menyampaikan 2 (dua) laporan yaitu Laporan Kegiatan dan Laporan Keuangan.

Proses pendampingan meliputi 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Organisasi, Bidang Kebijakan, Bidang Proses yang meliputi pemetaan mutu, perencanaan pemetaan mutu, pelaksanaan pemetaan mutu, monitoring dan evaluasi (audit) dan implementasi SPMI. Pentingnya mengembangkan dokumen dan melaksanakan penjaminan mutu internal, pengembangan rencana kegiatan sekolah dan audit mutu internal (Sani, dkk.,20150. Pendampingan melalui workshop pengembangan SPMI yang dihadiri dari LPMP Bali, Dinas Pendidikan Kab. Klungkung, pengawas sekolah, kepala sekolah imbas, guru-guru dari sekolah imbas serta dari penyelenggara sekolah model. Bertujuan untuk memberikan informasi tentang perkembangan sekolah model dan sekolah imbas, mengembangkan bidang organisasi, kebijakan dan proses serta inovasi-inovasi sekolah Pendampingan juga dilakukan pada perencanaan pembelajaran yang merujuk pada Permendikbud No 22 Tahun 2016 dan pelaksanaan tentang standar proses. salah satu guru disupervisi PBM oleh widyaiswara, perwakilan guru Mapel, kepala sekolah dan pengawas. Diakhiri dengan beberapa penyempurnaan, masukan dan saran baik dari widyaiswara, perwakilan guru, pengawas dan kepala sekolah.

Pembahasan

Dampak Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Dampak Organisasi :

Menurut Ahmad dan Wibowo pada Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan Volume 4, No. 1 April 2016 mengatakan pentingnya pemanfaatan hasil implementasi SPMI untuk membangun budaya mutu, akreditasi, sertikasi nasional dan internasional. Dari pelaksanaan SPM dari tahun 2016-2018 berbagai dampak positif dibidang organisasi telah dapat dicapai antara lain telah memiliki Tim Penjamin Mutu Pendidik Sekolah (TPMPS) struktur organisasi tugas dan fungsinya. Ditidaklanjuti dengan Tim Pelaksana Penguatan Pendidikan Karakter (TPPK), Tim Pelaksana Gerakan Literasi Sekolah (TPGLS), Tim Pelaksana Sekolah Ramah Anak (TPSRA), Tim Pelaksana Pendidikan Keluarga (TPPK), Tim Pengembangan Kurikulum (TPK) dan Tim Pelaksana Tri Hita Karana Award.

Dampak Kebijakan :

Berbagai kebijakan atau regulasi pusat dan daerah dijabarkan dan ditindaklanjuti dengan regulasi satuan pendidikan seperti halnya PP No. 19 Tahun 2005 yang disempurnakan dengan PP No. 32 Tahun 2013 tentang SNP dan Permendikbud No. 28 Tahun 2016 sebagai penjamin mutu satuan pendidikan ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Pengembang Kurikulum (TPK) dan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS). Begitu juga masalah PPDB dengan sistem zonasi dari pusat sesuai dengan permendikbud No. 51 Tahun 2018 sekolah menindaklanjuti dengan juklak juknis PPDB SMPN 1 Banjarangkan. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 87 Tahun 2017 tentang penguatan Pendidikan karakter sekolah menindaklanjuti dengan Tim Pelaksana Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Juga Tim Pelaksana GLS merupakan tindak lanjut dari pedoman Dirjen Dikdasmen Kemendikbud tentang gerakan literasi sekolah (GLS).

Bidang Proses :

Penjaminan mutu Pendidikan bertujuan agar seluruh satuan Pendidikan di Indonesia dapat memenuhi standar yaitu SNP, untuk itu setiap satuan Pendidikan harus mengacu pada SNP (Aris, 2019).

Pada bidang proses berbagai dampak positif dapat dirasakan dalam penerapan SPMI di SMPN 1 Banjarangkan diantaranya :

1. Pada Bidang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sesuai dengan Permendikbud No. 20 Tahun 2016 dimana beberapa indikator mutu mengalami peningkatan diantaranya lulusan memiliki kompetensi dimensi sikap yaitu perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri dari nilai 6,65 (****) menjadi 6,69 (****). Begitu juga pada sikap memiliki ketrampilan berfikir dan bertindak kritis 6,55 (****) menjadi 6,67 (****). Namun ada poin indikator yang harus mendapat perhatian yaitu masih rendah pada bidang pengetahuan fakta, prosedur, konseptual dan metakognitif. Untuk mengatasi permasalahan di atas sekolah menerapkan LKS (Lembar Kerja Siswa) dimana siswa terlibat dalam mengevaluasi guru-guru dalam proses pembelajaran yang dilakukan setiap hari efektif sekolah, dikumpulkan setiap seminggu sekali yang di tandatangani oleh ketua kelas sebagai wakil anggota kelas, wali kelas dan diketahui oleh kepala sekolah. Hal yang paling menggairahkan adalah pada aspek memiliki keterampilan berpikir dan berkolaborasi mencapai nilai 7 (****) memenuhi SNP, hal sesuai dengan pembelajaran abad-21.
2. Pada Standar Isi
Dampak positif terjadi secara keseluruhan pada KTSP dikembangkan sesuai prosedur dari nilai 4,31 (****) menjadi 5,69 (****) kenaikan signifikan terjadi pada sekolah telah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan dari nilai 2,63 (****) menjadi 6,5 (****). Namun ada yang perlu ditingkatkan tentang karakteristik kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan pada perangkat pembelajaran dari nilai 7 (****) menjadi 5,42 (****), 5,87 (****) dan 9,72(****). Pada standar isi sesuai Permendikbud No. 21 Tahun 2016 sekolah telah melaksanakan reviu perangkat pembelajaran dengan pemanfaatan waktu luang (PWT) melalui MGMP sebelum pulang secara terjadwal dan review KTSP.
3. Pada Bidang Proses
Pada rapor mutu standar proses mengalami peningkatan secara keseluruhan dari 5,18 (****) menjadi 6,5 (****) yang mencakup sekolah dalam merencanakan pembelajaran, proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat, pengawasan dan penilaian autentik dilakukan dalam proses pembelajaran. Pada bidang proses kepala sekolah dan pengawas pembina melaksanakan pendampingan mulai dari reviu RPP dan melaksanakan supervisi proses pembelajaran di kelas dan khusus untuk mapel TIK atau informatika dan BK dilakukan secara tatap muka terjadwal dengan mengambil jam ke nol atau setelah akhir pembelajaran. Yang perlu ditingkatkan dalam standar proses adalah menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan dimana saja adalah kelas.
4. Proses Penilaian
Sesuai Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian bahwa satuan Pendidikan wajib melaksanakan penilaian. Pada aspek penilaian terjadi peningkatan dari 3,97 (***) menjadi 6,08 (****) yang meliputi aspek penilaian sesuai ranah kompetensi, teknik penilaian objektif dan akuntabel, penilaian pendidikan ditindaklanjuti, instrumen penilaian menyesuaikan aspek dan penilaian dilakukan mengikuti prosedur. Yang perlu menjadi perhatian adalah instrumen penilaian dan penilaian dilakukan belum semua guru mengikuti prosedur. Untuk itulah melalui SPMI sekolah telah melaksanakan workshop penyusunan RPP, supervisi yang dilakukan oleh LPMP Bali, pengawas sekolah, Kepala Sekolah dan mendatangkan narasumber yang berkompeten dalam penyusunan RPP khususnya pada bidang penilaian dan juga pemberdayaan MGMP sekolah.
5. Pada Standar PTK
Pada standar Pendidikan dan tenaga kependidikan mengalami peningkatan yang kecil secara keseluruhan komponen dari 4,56 (***) menjadi 4,89 (***). Permasalahn yang terjadi pada tenaga pelaksanaan urusan administrasi kualifikasi pendidikan belum sesuai ketentuan, belum memiliki tenaga laboran dan tenaga pustakawan. Langkah-langkah sekolah adalah melakukan pemetaan melalui analisis kebutuhan mengikuti diklat, serta pengusulan kepada Dinas Pendidikan dan LPMP Bali dan instansi terkait.
6. Pada Standar Saprasi

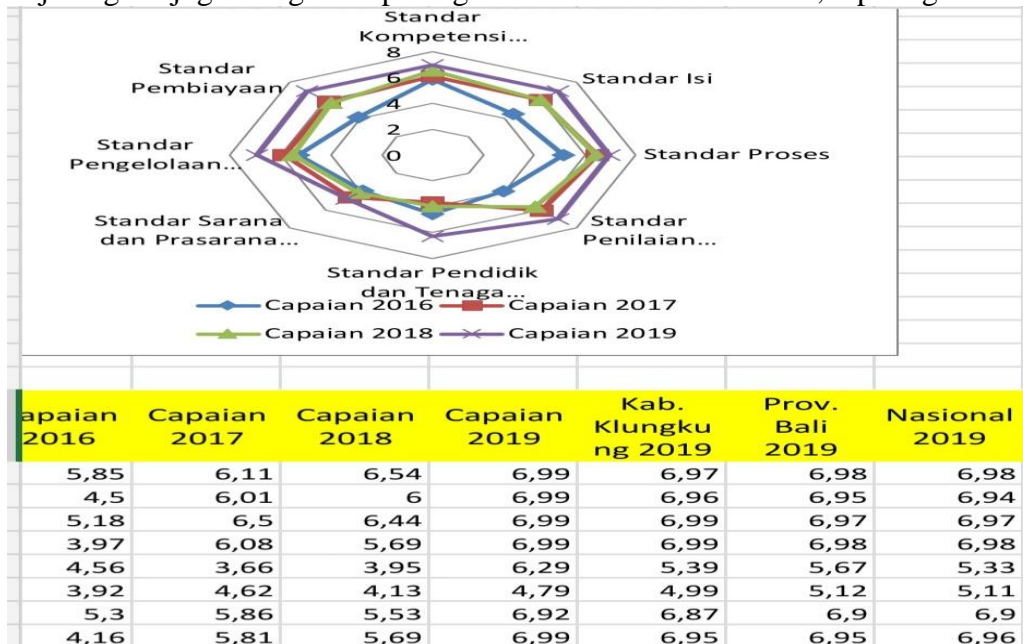
Pada bidang standar saptas hampir sama dengan bidang PTK mengalami peningkatan yang masih minim dari 3,92 (***) menjadi 4,62 (***) yang mencakup kapasitas daya tampung sekolah memadai, sekolah memiliki daya saptas pembelajaran yang lengkap dan layak dan sekolah memiliki saptas pendukung yang layak dan lengkap. Yang menjadi perhatian lebih adalah rasio luas lahan, ruang perpustakaan, laboratorium IPA, ruang kantin serta RKB. Bertitik tolak hal tersebut sekolah mengambil langkah-langkah dengan menyusun skala kebutuhan ditindaklanjuti dengan pengajuan usulan atau proposal sehingga hasilnya status lahan sekolah telah bersertifikat, setiap tahun mendapat bantuan RKB dan rehab sekolah, mengalokasikan dana pemeliharaan atau perawatan dan memiliki piket kebersihan secara terjadwal dengan melibatkan siswa, guru piket dan Staf TU.

7. Standar Pengolahan

Pada standar pengolahan yang memiliki perencanaan pengelolaan, program pengelolaan dari 5,3 (****) menjadi 5,86 (****). Yang perlu menjadi perhatian adalah pedoman pengelolaan sekolah secara lengkap, meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Langkah-langkah yang dilakukan sekolah adalah dengan meningkatkan kompetensi dan kair tenaga pendidik dan tenaga kependidikan melalui diklat, mengikuti kompetensi seperti OGN, memperdayakan kelompok-kelompok Guru, menjalin kerjasama dan komunikasi dengan pihak lain.

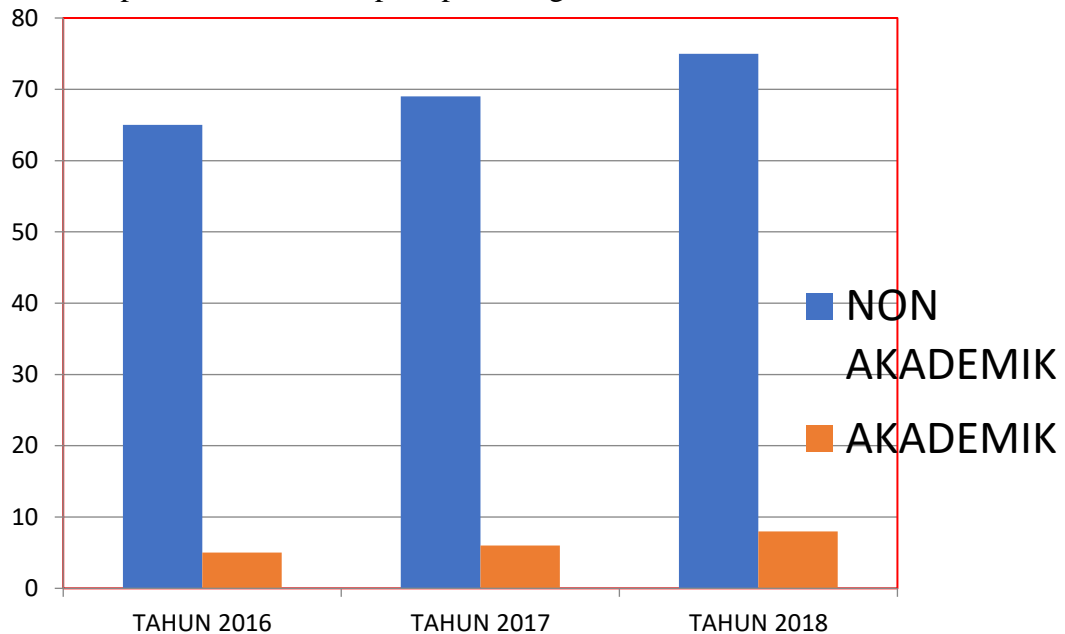
8. Standar Pembiayaan

Pada standar pembiayaan pada rapor mutu 2016 mencapai 4,16 (***) menjadi 5,81 (****) pada tahun 2017. Standar pembiayaan mencakup sekolah memberikan layanan subsidi silang, beban operasional sekolah sesuai ketentuan dan pengelolaan dana dengan baik Di SMPN 1 Bnjarangkan dalam mengatasi pembiayaan sekolah memiliki yang namanya tentang kentong yadnya atau disebut dengan dana abadi sekolah terintegasi (DASI) bersumber pada sumbangan atau bantuan sukarela yang tidak mengikat yang dipergunakan untuk kegiatan sosial seperti pemberian bantuan kepada siswa kurang mampu, kunjungan ke panti asuhan, dan untuk pengadain masyarakat. Dasi ini dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan sekolah yang tidak bisa dibiayai oleh dana BOS seperti bonus kejuaraan, pembelian dan pemeliharaan AC. Kemajuan lainnya yang dialami sekolah dilihat dari hasil Penilaian Kinerja Sekolah (PKS) mengalami peningkatan dari tahun 2016-2017 yaitu dari jumlah nilai 89,17 dengan kreteria B (baik) menjadi 91,27 dengan kreteria A (unggul). Pada nilai rapor mutu PMP SMP Negeri Banjarangkan juga mengalami peningkatan dari tahun 2016-2018, seperti gambar berikut.



Gambar 1 : Rapor Mutu Sekolah dari Tahun 2016-2019

Yaitu SKL dari 5,85 menjadi 6,11, 6,54, dan 6,99, SI dari 4,5 menjadi 6,01, 6,00 dan 6,99, Standar Proses dari 5,18 menjadi 6,5, 6,44 dan 6, 99 Standar Penilaian dari 3,97 menjadi 6,08, 5, 69 dan 6, 99, Standar PTK dari 4,56 menjadi 3,66, 3,95 dan 6, 29, Standar Saprass dari 3,92 menjadi 4,62, 4, 13 dan 4, 79, Standar Pengelolaan pendidikan dari 5,3 menjadi 5,86, 5, 53 dan 6, 92 dan standar Pembiayaan dari 4,16 menjadi 5,81, 5, 69 dan 6, 99. Pada prestasi akademik dan non akademik dari tahun 2016-2018 mengalami kenaikan dari 38 juara non akademik, 1 juara akademik tahun 2016, pada tahun 2017 6 juara akademik, 61 juara non akademik menjadi 68 pada prestasi non akademik dan 6 prestasi pada akademik pada tahun 2018, seperti pada diagram berikut ini.



Gambar 2 : Prestasi Akademik dan Non Akademik

Pada hasil efektifitas pelaksanaan SPMI yang dilakukan oleh SPMI Bali bahwa pelaksanaan SPMI di SMPN 1 Banjarangkan berjalan sangat efektif seperti tabel berikut. Yang didukung oleh data dimana bidang organisasi 96,43, bidang kebijakan 75,00, bidang pemetaan mutu 92,86, bidang perencanaan pemenuhan mutu 92,86, bidang pelaksanaan pemenuhan mutu 96,88, bidang monitoring dan evaluasi (audit) 85,00, hasil implementasi SPMI 93,75, rata-rata nilai 90,40 kriteria sangat efektif.

Dari hasil evaluasi 8 (delapan) standar yang dilakukan oleh kepala sekolah dari tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2 : Hasil Supervisi 8 (delapan) Standar Tahun 2016 – 2018

No	Standar	Tahun		
		2016	2017	2018
1	Isi	73.33	88.33	95.00
2	Proses	82.50	82.50	92.50
3	Lulusan	96.00	98.00	99.00
4	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	87.55	92.55	91.80
5	Sarana dan Prasarana	78.33	84.17	85.00
6	Pengelolaan	89.00	94.00	95.00
7	Pembiayaan	74.00	74.00	74.00
8	Penilaian	87.50	90.00	93.75
Rerata		83.53	87.94	90.76

Dari uraian tabel di atas bahwa terjadi kenaikan rata-rata pelaksanaan SPMI yaitu dari 83,53; 87,94 dan 90,76.

Inovasi Sekolah :

Dari hasil pelaksanaan SPMI sekolah melaksanakan beberapa inovasi diantaranya :

1. Guru-guru dan staf TU melaporkan kinerja setiap hari yang disebut dengan Lembar Kinerja Guru dan Pegawai yang disebut LKGP.
2. Dalam proses pembelajaran siswa dilibatkan dalam mengevaluasi guru-guru dalam pembelajaran yang disebut dengan LKS (Lembar Kinerja Siswa).
3. Dalam program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) sekolah melaksanakan program LAPENDER (Laboratorium Pendidikan Karakter) dimana siswa secara terjadwal dari Dinas Pendidikan menampilkan ketrampilan dan kreatifitas seni di tempat obyek wisata yang ada di wilayah kabupaten Klungkung. Bertujuan untuk melatih keberanian siswa, mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki siswa, menambah wawasan dan pengetahuan siswa terutama dalam berkomunikasi bahasa Inggris karena pada saat tampil siswa juga berdialog dengan wisatawan yang hadir pada obyek wisata tersebut.
4. Untuk mengembangkan GLS (Gerakan Literasi Sekolah) dan Waja (Wajib Baca) sekolah memiliki program inovasi yang disebut dengan MOCIL (Motivator Cilik) dimana siswa secara terjadwal memberikan motivasi kepada teman-temannya sebelum pembelajaran dimulai dengan menyampaikan topik atau materi seperti kenakalan remaja, narkoba, penggunaan medsos, tata tertib sekolah, seni budaya, menjaga lingkungan dan sebagainya. Kegiatan ini bertujuan untuk membudayakan anak gemar membaca, keberanian mengemukakan pendapat, keberanian bertanya, melatih berpikir kritis, belajar menghargai pendapat dan melatih jiwa kreatif. Siswa yang terbaik pada Mocil akan menjadi PENCIL (Pembina cilik) pada upacara bendera hari Senin.
5. Sekar adalah Senin Karakter dimana pada setiap hari diumumkan prestasi yang diraih siswa, pada saat tersebut pula siswa menerima penghargaan. Disamping mengumumkan prestasi pada hari Senin pula diumumkan kelas yang berkategori kurang bersih, kurang peduli pada lingkungan. Manfaat dari gerakan ini adalah anak-anak akan lebih termotivasi untuk berprestasi, dan khusus setelah diumumkan kelas yang kurang bersih kedepannya anak-anak berlomba-lomba untuk menjaga kebersihan dan telajakannya.
6. Untuk menjaga *local genius* (kearifan lokal) dan menghadapi abad ke-21 yang dikenal dengan abad revolusi mental sekolah menerapkan hari berbahasa daerah setiap hari Kamis dengan berbusana adat, hari berbahasa Inggris setiap hari Jumat dan hari berbasis IT setiap hari Rabu.
7. Inovasi lainnya dalam membantu pembiayaan pengelolaan sekolah adalah sekolah memiliki DASI (dana abadi sekolah terintegrasi), dana ini bersumber dari sumbangan orang tua siswa, para alumni, dunia usaha, warga sekolah, yang tidak mengikat yang peruntukannya dipakai untuk membantu pembiayaan sekolah yang tidak bisa dibiayai dari dana BOS. Seperti halnya pemberian hadiah bagi siswa berprestasi, biaya siswa sakit, pemberian beasiswa kepada siswa kurang mampu, pemberian paket sembako kepada orang tua kurang mampu, sumbangan ke panti asuhan, pengabdian masyarakat, pembelian alat-alat sekolah yang diberikan kepada siswa kurang mampu dan pembelian AC di Lab Komputer.
8. Sekolah memiliki program Enter Clik (*entrepreneur cilik*) dimana siswa belajar sejak dini belajar wiraswasta muda dengan memanfaatkan barang-barang bekas lewat BURSA (Buru Sampah) disamping kepedulian pada lingkungan juga menghasilkan barang-barang ekonomis, yang dapat dipakai sebagai bahan pameran hasil kerajinan siswa.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMI) di SMPN 1 Banjarangkan memiliki dampak positif mengacu pada bidang organisasi, kebijakan dan proses. Dibidang proses mencakup proses pemetaan mutu, proses prestasi akademik dan non akademik, proses penilaian kinerja sekolah (PKS) yang mencakup 8 (delapan) standar dan efektifitas program SPMI. Dapat disarankan kepada penulis tetap melanjutkan dan mengembangkan penelitian ini dan mencoba pada penelitian lainnya. Kepada penulis lainnya dapat dijadikan salah satu panduan dan melaksanakan atau menyusun penelitian

yang belum sempat disajikan oleh penulis. Kepala sekolah dapat memotivasi warga sekolah untuk menyusun atau membuat penelitian yang sejenis sebagai bentuk pengembangan keprofesian berkelanjutan. Untuk Dinas Pendidikan penelitian ini bisa dijadikan salah satu program pengembangan kompetensi kepada sekolah dan dijadikan upaya pembinaan dan pembelajaran dalam mengembangkan PKB.

DAFTAR PUSTAKA

- Aris Muhammad. 2019. *Implementasi Pengimbasan SPMI Sekolah Model SMP A. Wahid Hasyim Tebuireng Jombang Ke Sekolah Imbas*, Surabaya.
- Kemdikbud. 2016. *Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan*, Jakarta: Dirjen Dikdasmen.
- Kemdikbud. 2017. *Indikator Mutu Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah*, Jakarta: Dirjen Dikdasmen.
- Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005. *Stantar Nasional Pendidikan*, Jakarta.
- Permendikbud RI No. 28. 2016. *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah*, Jakarta.
- Permendikbud RI No. 20. 2016. *Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah*, Jakarta.
- Permendikbud RI No. 21. 2016. *Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah*, Jakarta.
- Permendikbud RI No. 22. 2016. *Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah*, Jakarta.
- Permendikbud RI No. 23. 2016. *Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah*, Jakarta.
- Perpres RI Nomor 87 Tahun 2017. *Penguatan Pendidikan Karakter*, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2017. *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru*. Jakarta.
- Permendikbud RI No. 6 Tahun 2018. *Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah*, Jakarta.
- Sani dkk. 2015. *Penjaminan Mutu Sekolah*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Sulaiman Ahmad, Udik Budi Wibowo. 2016. *Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan di Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta : Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan Volume 4, No. 1